



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

**1721 - A2**

NOMOR : 00/1616520

Pembetulan Ke

Pembatalan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

0	1	1	2
---	---	---	---

TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN

2	0	2	4
---	---	---	---

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP : 001573609926000

A.5 NAMA JABATAN : Eselon III A

A.2 NIP/NRP : 198104162006041015

A.6 JENIS KELAMIN :  LAKI - LAKI  PEREMPUAN

A.3 NAMA : AGUSTINUS DAMMA RENNA

A.7 NIK : 5312151604810002

A.4 PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tk.I / IV/b

A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGJAN KELUARGA UNTUK PTKP  
K / 3

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60.834.600
2. TUNJANGAN ISTRY	6.083.460
3. TUNJANGAN ANAK	2.433.384
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	17.640.000
6. TUNJANGAN BERAS	4.055.520
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN :	284
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	162.678.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )	253.725.248
<b>PENGURANG</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	6.000.000
11. IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT	3.294.193
12. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.D. 12 )	9.294.193
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 -13 )	244.431.055
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN )	244.431.055
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	172.431.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19.864.650
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21. PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22. PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	19.864.650
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	4.072.676
23a. PPh PASAL 21 DI POTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	4.072.676
24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	15.791.974
24a. PPh PASAL 21 DI POTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	15.791.974

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01  DIPINDAHKAN

C.02  PINDAHAN

C.03  BARU

C.04  PENSIUN

**D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001243013926000

D.2 Nama Instansi Pemerintah : KPU KAB. SUMBA BARAT DAYA

D.3 ID Sub Unit Organisasi : 670280

D.4 Tanggal : 

3	1
---	---

 dd 

1	2
---	---

 mm 

2	0	2	4
---	---	---	---

 yyyy

D.5 NAMA PENANDATANGAN : MARLINCE SUSANA MALO

D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah